

ABSTRAK

Pemberdayaan garam merupakan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi pesisir yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petambak garam. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menjadi landasan hukum yang penting dalam upaya mengatasi masalah tersebut. Undang-undang ini menegaskan perlunya pemberdayaan melalui penyediaan sarana dan prasarana, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses permodalan, dan jaminan harga yang wajar. Di daerah sentra produksi garam seperti Kabupaten Pamekasan, konsep **kawasan minapolitan** menjadi pendekatan strategis untuk mengintegrasikan aspek produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran garam rakyat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan pemberdayaan tersebut pada prinsipnya telah sejalan dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 5 Tahun 2016, khususnya dalam aspek peningkatan kesejahteraan dan pemanfaatan teknologi. Namun demikian, diperlukan pendampingan berkelanjutan dan penguatan literasi digital agar pemberdayaan petambak garam dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

Kata kunci: *pemberdayaan, garam, petambak, minapolitan, Pamekasan*

ABSTRACT

Salt empowerment is a crucial part of the coastal economic development strategy, oriented towards improving the welfare of the community, particularly salt farmers. Law Number 7 of 2016 concerning the Protection and Empowerment of Fishermen, Fish Farmers, and Salt Farmers serves as a crucial legal basis for addressing this issue. This law emphasizes the need for empowerment through the provision of facilities and infrastructure, institutional strengthening, human resource capacity building, easy access to capital, and guaranteed fair prices. In salt production centers such as Pamekasan Regency, the concept of a **minapolitan area** is a strategic approach to integrating the production, processing, distribution, and marketing of community-based salt.

The research method used is a normative empirical method with a legislative and sociological approach. Data were obtained through literature review and field research, then analyzed qualitatively.

The results indicate that the implementation of this empowerment is, in principle, in line with the objectives of Pamekasan Regency Regulation Number 5 of 2016, particularly in terms of improving welfare and utilizing technology. However, ongoing mentoring and strengthening of digital literacy are needed to ensure optimal and sustainable empowerment of salt farmers.

Keywords: *empowerment, salt, farmers, minapolitan, Pamekasan*